

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam mengarahkan arah pembangunan nasional. Dalam konteks global, kualitas pendidikan sering kali dijadikan tolok ukur kemajuan suatu negara. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang unggul, seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada mutu sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang efektif dan berkeadilan. Di Indonesia, berbagai reformasi kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari perbaikan kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga penguatan tata kelola dan transparansi pendanaan.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensi, baik dari segi pemerataan akses, mutu pembelajaran, maupun efektivitas pengelolaan sumber daya. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap keberlanjutan sistem pendidikan adalah pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan dana pendidikan yang baik akan menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga seluruh proses pendidikan dapat berjalan optimal. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat menimbulkan pemborosan, penyimpangan, dan penurunan kualitas layanan pendidikan.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat sektor pendidikan melalui alokasi anggaran 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan tersebut adalah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah menjadi salah satu program unggulan nasional dalam meningkatkan akses pendidikan dan meringankan beban masyarakat. Program ini memberikan bantuan dana langsung kepada sekolah untuk mendukung kegiatan operasional non-personalia, seperti pembelian alat tulis, perawatan sarana, biaya ujian, serta kegiatan pembelajaran lainnya.

Sejak diluncurkan tahun 2005, Program BOS telah mengalami berbagai pembaruan dan penyempurnaan kebijakan. Pemerintah secara konsisten memperbaiki mekanisme penyaluran, sistem pelaporan, serta aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, menjadi regulasi terbaru yang menegaskan bahwa setiap sekolah penerima dana BOS wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara berkala dan sesuai ketentuan. Laporan ini berfungsi tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, tetapi juga sebagai dasar evaluasi efektivitas program BOS dalam mendukung kegiatan pembelajaran.

Menurut VOA Indonesia (2025), total dana BOS nasional mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, dengan proporsi terbesar dialokasikan

untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Besarnya dana publik yang dikelola menuntut adanya mekanisme pelaporan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BOS, seperti keterlambatan penyusunan laporan, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan juknis, dan lemahnya sistem pengendalian internal di sekolah.

Berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal Kemendikbud (2021), ditemukan lebih dari 1.200 sekolah di Indonesia yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, baik dalam bentuk penggunaan di luar kebutuhan pendidikan, ketidaksesuaian dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), maupun ketidaktertiban dalam pelaporan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pelaporan masih perlu diperkuat. Selain itu, tingkat kompetensi pengelola keuangan di sekolah, khususnya bendahara, juga menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan implementasi program BOS.

Bendahara sekolah memiliki peran vital dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana BOS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, bendahara dituntut memiliki kemampuan yang mencakup tiga aspek penting yaitu pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan sekolah, kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi pelaporan digital seperti ARKAS dan BOS Online, dan integritas serta

tanggung jawab moral dalam mengelola dana publik. Kompetensi bendahara yang rendah dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat, tidak sesuai waktu, atau tidak sesuai regulasi.

Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, khususnya bendahara, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Semakin tinggi tingkat kompetensi bendahara, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sebaliknya, bendahara yang kurang memahami aspek teknis dan administratif cenderung menghasilkan laporan yang tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi bendahara melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pengelolaan keuangan pendidikan.

Selain faktor internal berupa kompetensi bendahara, faktor eksternal berupa pengawasan Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dan pelaporan dana BOS berjalan sesuai aturan. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang berfungsi memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan dana BOS dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Menurut Octavia & Susanti, (2024), pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif mampu mendorong sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan Dinas Pendidikan di banyak daerah masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansi laporan. Berdasarkan studi Universitas Padjadjaran (2023), masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan bimbingan teknis maupun pembinaan secara langsung terkait penyusunan laporan BOS. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman sekolah terhadap juknis BOS yang terus diperbarui oleh pemerintah. Minimnya pengawasan substantif juga membuka peluang terjadinya kesalahan administratif dan penyimpangan penggunaan dana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan fungsi pengawasan yang bersifat pembinaan, bukan hanya pemeriksaan, agar kualitas laporan keuangan sekolah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Faktor ketiga yang turut memengaruhi kualitas laporan dana BOS adalah pemanfaatan sistem digital. Di era digitalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan sekolah menjadi suatu keniscayaan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan berbagai sistem aplikasi digital seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Sistem digital ini dirancang agar setiap transaksi dan kegiatan keuangan sekolah dapat terekam secara real time dan terintegrasi dengan sistem pusat. Dengan demikian, proses validasi, audit, dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

Namun demikian, pemanfaatan sistem digital di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat teknologi di sekolah, serta rendahnya kemampuan teknis bendahara dalam mengoperasikan aplikasi digital. Rahayu (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan erat dengan tingkat akuntabilitas dan efektivitas pelaporan keuangan. Sekolah yang mampu memanfaatkan sistem digital secara optimal cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu dibandingkan sekolah yang masih melakukan pelaporan manual.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, termasuk Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota Kupang, meskipun merupakan ibu kota provinsi, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan Genpi (2024) dan Neliti (2022), tantangan utama yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Kota Kupang meliputi: keterbatasan akses internet, minimnya pelatihan penggunaan sistem digital, rendahnya kompetensi bendahara, serta lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan sekolah dan keterlambatan pelaporan dana BOS. Berikut ini adalah jumlah sekolah di kota kupang.

Tabel 1.1
Daftar Sekolah Di Kota Kupang 2025

No	Daftar Sekolah SMA - Manajemen Aplikasi RKAS			
1	NPSN	Nama Sekolah	Status	Kota/Kabupaten
2	69870904	SMA PLUS MASA DEPAN MANDIRI	Swasta	Kota Kupang
3	69763284	SMAS PLUS OLAHRAGA NUSA TIMOR	Swasta	Kota Kupang
4	69726555	SMAS KRISTEN GENERASI UNGGUL	Swasta	Kota Kupang
5	50304930	SMAN 2 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
6	69892401	SMA Negeri 12 Kupang	Negeri	Kota Kupang
7	50304933	SMAS SEMINARI ST RAFAEL	Swasta	Kota Kupang
8	50308460	SMAS TUNAS BANGSA	Swasta	Kota Kupang
9	50304937	SMAS KATOLIK ST CAROLUS	Swasta	Kota Kupang
10	69896535	SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri	Swasta	Kota Kupang
11	50308513	SMAS FLOBAMOR	Swasta	Kota Kupang
12	50304948	SMA KATOLIK GIOVANNI KUPANG	Swasta	Kota Kupang
13	50305120	SMAN 4 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
14	69767796	SMAS KRISTEN 2 KUPANG	Swasta	Kota Kupang
15	50305263	SMAS TELADAN	Swasta	Kota Kupang
16	50304935	SMAS MUHAMMADIYAH KUPANG	Swasta	Kota Kupang
17	50305119	SMAN 3 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
18	50309006	SMA TUNAS HARAPAN	Swasta	Kota Kupang
19	50304943	SMAN 9 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
20	50305118	SMAS KRISTEN MERCUSUAR	Swasta	Kota Kupang
21	50306082	SMAS NCIPS	Swasta	Kota Kupang
22	69896554	SMA Kristen Tunas Gloria	Swasta	Kota Kupang
23	60702920	SMAN 11 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
24	69978370	SMA SWASTA NESI NEONMAT	Swasta	Kota Kupang
25	50305121	SMAN 8 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
26	50304945	SMAN 7 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
27	50304947	SMAN 5 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
28	50305262	SMAS KRISTEN 1 KUPANG	Swasta	Kota Kupang
29	69987823	SMA SWASTA ABDI KASIH BANGSA	Swasta	Kota Kupang
30	69752273	SMAS TIMPOLMAS	Swasta	Kota Kupang
31	50306170	SMAN 10 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
32	50304934	SMAS PGRI KUPANG	Swasta	Kota Kupang
33	50304936	SMA KI HAJAR DEWANTORO	Swasta	Kota Kupang
34	69986032	SMA TIGA PUTRA	Swasta	Kota Kupang
35	50305261	SMAS EL TARI	Swasta	Kota Kupang
36	69946086	SMA NEGERI KEBERBAKATAN OLAHRAGA FLOBAMOR	Negeri	Kota Kupang
37	70010693	SMA Swasta Sta. Familia Sukumana Kupang	Swasta	Kota Kupang
38	50304949	SMAS BERINGIN	Swasta	Kota Kupang
39	69969313	SMA DIAN HARAPAN KUPANG	Swasta	Kota Kupang
40	50305384	SMAS SUDIRMAN	Swasta	Kota Kupang
41	69988292	SMA STO. ARNOLDUS JANSSEN KUPANG	Swasta	Kota Kupang
42	50304931	SMAN 1 KUPANG	Negeri	Kota Kupang
43	50304946	SMAN 6 KUPANG	Negeri	Kota Kupang

Di beberapa sekolah, laporan keuangan masih disusun secara manual terlebih dahulu sebelum diunggah ke sistem digital, yang menyebabkan duplikasi data dan potensi kesalahan input. Selain itu, tidak semua bendahara memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi BOS Online atau ARKAS. Akibatnya, sekolah sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan laporan dengan format terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pengawasan Dinas Pendidikan masih terbatas

pada aspek administratif, sehingga pembinaan langsung terhadap sekolah-sekolah belum dilakukan secara intensif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah. Padahal, kualitas laporan dana BOS merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Laporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu dapat menimbulkan masalah dalam proses audit, menghambat penyaluran dana tahap berikutnya, serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola dana pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wuriasih et al., (2025) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, kompetensi pimpinan sekolah, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada sekolah dasar di Distrik Manokwari Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kualitas SDM, kepemimpinan sekolah, dan pemanfaatan teknologi informasi belum mampu menjelaskan kualitas pelaporan keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar aspek internal sekolah yang kemungkinan lebih dominan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian Wuriasih et al., (2025) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, kompetensi pimpinan sekolah, dan sistem informasi akuntansi tidak

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dana BOSP di sekolah dasar. Temuan tersebut menegaskan bahwa faktor internal seperti SDM, kepemimpinan, dan teknologi belum mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Fokus penelitian ini berada pada tingkat sekolah dasar dan menitikberatkan pada faktor-faktor internal organisasi, tanpa mempertimbangkan variabel eksternal seperti pengawasan dari pihak dinas maupun kebijakan struktural.

Sementara itu, penelitian Wulandari et al., (2025) menyoroti bahwa kompetensi dan profesionalisme bendahara berperan penting dalam efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Penelitian ini untuk menganalisis peran kompetensi dan profesionalisme staf bendahara terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis, seperti pemahaman terhadap regulasi keuangan serta kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi keuangan daerah, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketepatan waktu dan akurasi pelaporan. Profesionalisme staf bendahara yang tercermin dari integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap standar operasional juga terbukti memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, SOP yang jelas, dan lingkungan kerja yang kondusif, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala berupa minimnya pelatihan berkelanjutan, beban kerja ganda, serta perubahan regulasi yang cepat tanpa sosialisasi memadai. Temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas sumber

daya manusia untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efektif.

Meskipun penelitian ini memberikan bukti bahwa kapasitas teknis dan etika kerja bendahara sangat memengaruhi akurasi serta transparansi pelaporan, penelitian tersebut tidak menguji hubungan langsung antara kompetensi bendahara dengan kualitas laporan dana BOS pada satuan pendidikan. Selain itu, variabel penting seperti mekanisme pengawasan dari Dinas Pendidikan dan pemanfaatan sistem digital belum menjadi bagian dari model analisis.

Dari kedua penelitian tersebut, tampak adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) pada beberapa aspek utama. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus menguji pengaruh kompetensi bendahara, pengawasan Dinas Pendidikan, dan pemanfaatan sistem digital secara simultan terhadap kualitas laporan dana BOS, khususnya pada tingkat SMA. Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas pengelolaan keuangan secara umum atau kualitas laporan dana BOSP di tingkat sekolah dasar, sehingga konteks pendidikan menengah yang memiliki kompleksitas administratif lebih tinggi belum banyak dikaji. Ketiga, variabel pengawasan dinas dan pemanfaatan sistem digital merupakan faktor yang semakin relevan seiring digitalisasi tata kelola keuangan, namun belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana kompetensi bendahara, pengawasan Dinas Pendidikan, dan pemanfaatan sistem digital secara bersama-sama memengaruhi

kualitas laporan dana BOS pada SMA di Kota Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam penguatan tata kelola keuangan sekolah di era digital.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan pendidikan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di sekolah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah dalam merumuskan kebijakan serta strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan optimalisasi sistem digital dalam pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual pelaporan dana BOS di SMA Kota Kupang serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam meningkatkan tata kelola keuangan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji secara spesifik pengaruh kompetensi bendahara, pengawasan dinas pendidikan, dan pemanfaatan sistem digital terhadap kualitas laporan dana BOS di tingkat SMA Kota Kupang, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan sekolah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi bendahara berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana BOS di SMA Kota Kupang?
2. Apakah pengawasan Dinas Pendidikan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana BOS di SMA Kota Kupang?
3. Apakah pemanfaatan sistem digital berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana BOS di SMA Kota Kupang?
4. Apakah Kompetensi Bendahara, Pengawasan Dinas Pendidikan, Pemanfaatan Sistem digital berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kualitas laporan dana Bos di SMA Kota Kupang?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi bendahara terhadap kualitas laporan dana BOS.
2. Mengetahui pengaruh pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kualitas laporan dana BOS.
3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem digital terhadap kualitas laporan dana BOS.
4. Mengetahui pengaruh Kompetensi Bendahara, Pengawasan Dinas Pendidikan, Pemanfaatan Sistem Digital Terhadap Kualitas Laporan dana BOS.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi pada bidang pendidikan, khususnya dalam bidang tata kelola keuangan sekolah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan wilayah Indonesia bagian timur yang masih minim kajian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kompetensi bendahara sekolah serta mendorong pemanfaatan sistem digital secara optimal guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan.
- b. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan.
- c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program pendidikan pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini juga berpotensi mendukung pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal melalui tata kelola keuangan yang lebih baik.